



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ)

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

Jalan. APT. Pranoto 3 Tanjung Redeb – Berau

2020

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau eksistensinya berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Berau Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Kabupaten Berau Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Sebelumnya Urusan Komunikasi dan Informatika menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, yaitu pada Bidang komunikasi dan Informatika dan Bagian Teknologi Informasi Sekretariat Daerah Kabupaten Berau.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau sebagai Organisasi Perangkat (OPD) yang membidangi Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, tentu diharapkan memenuhi tuntutan masyarakat utamanya dalam rangka memberikan pelayanan bidang komunikasi dan informatika kepada masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi. Dengan upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik di bidang kominfo yang dilaksanakan Dinas Kominfo diharapkan masyarakat akan lebih partisipatif memanfaatkan komunikasi dan informatika, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta implementasi e-governmen dalam rangka terwujudnya reformasi birokrasi di Kabupaten Berau.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, diperlukan suatu perencanaan yang dapat menentukan arah kebijakan dan sasaran yang akan dicapai, sehingga diperlukan perencanaan.

Untuk tingkat OPD ada 2 (dua) jenis perencanaan, yaitu Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Komunikasi dan Informatika yang merupakan bagian dari Perencanaan Pembangunan daerah disusun atas program yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dengan mengacu pada visi misi dan program Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJM Daerah Kabupaten Berau 2016-2021.

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau di samping berpedoman pada RPJMD juga harus memperhatikan Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Renstra Dinas

Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur serta dengan memperhatikan isu-isu dan faktor-faktor strategis bidang Komunikasi dan Informatika, statistik, dan Persandian.

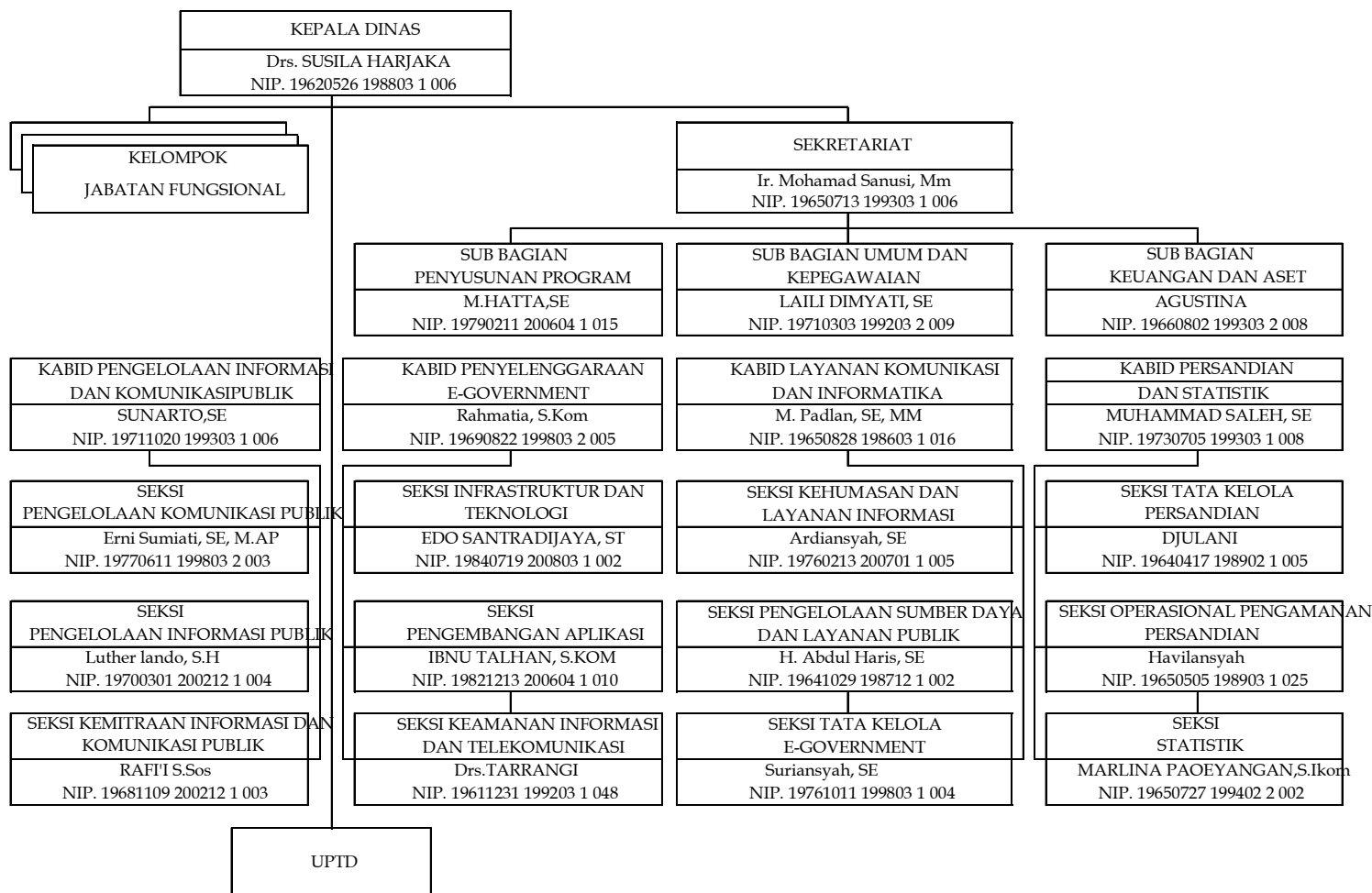
Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau tahun 2016-2021 merupakan bagian integral dari RPJMD Kabupaten Berau tahun 2016-2021 yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika setiap tahun mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Renja SKPD menjadi acuan untuk penyusunan RKA-SKPD (Rencana Kerja Anggaran SKPD).

1.2 LANDASAN HUKUM

Ada beberapa landasan hukum yang menjadi acuan dalam pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
2. Peraturan Bupati Berau Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.
3. Adapun nomenklatur Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 Adalah Dinas Komunikasi dan Informatika.
4. Urusan yang melekat pada Dinas Komunikasi dan Informatika adalah urusan Komunikasi dan Informatika, urusan Persandian dan Urusan Statistik Sektoral, hal ini termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah.
5. Berikut ini disajikan Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Berau per tanggal 31 Desember 2019 :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BERAU



6. Aparatur sipil negara yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika berjumlah 42 orang yang dapat digambarkan dalam Daftar Urut Kepegawaian (DUK) per tanggal 31 Desember 2019 sebagai berikut :

6	SUNARTO, SE	711020 199203 1 0	01-03-1993	III/d	01-04-2011	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	05-10-2017	III.B	24	9	DIKLAT PIM TK. II	2011	
7	DJULANI	640417 198902 1 0	01-02-1989	III/d	01-04-2014	KEPALA SEKSI TATA KELOLA PERSANDIAN	BIDANG PERSANDIAN DAN STATISTIK	04-01-2017	IV.A	28	10	DIKLAT ADUM IV	1998	
8	AHMATIA, S.Ko	690822 199803 2 0	01-03-1998	III/d	01-04-2014	KEPALA BIDANG PENYELENGGA RAAN E-GOVERNMENT	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	17-12-2018	III.b	15	10	DIKLAT PIM TK. IV	2003	285
9	AILI DIMYAT	710303 199203 2 0	01-03-1992	III/d	01-04-2014	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	SEKRETARIAT	05-10-2017	IV.A	25	9	DIKLAT PIM TK. IV	2013	285
10	AGUSTINA	660802 199303 2 0	01-03-1993	III/d	01-04-2014	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET	SEKRETARIAT	12-01-2017	IV.A	24	9	DIKLAT ADUM VII	1999	250
11	THER LANDO,	700301 200212 1 0	01-12-2002	III/d	01-04-2015	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK	BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	17-12-2018		15	7			

12	RAFII, S.Sos	681109 200212 1 0	01-12-2002	III/d	01-04-2015	KEPALA SEKSI KEMITRAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	12-01-2017	IV.A	12	4	DIKLAT PIM TK. IV	2014	
13	RIZKY ARDIAN	790620 200212 1 0	01-12-2002	III/d	01-04-2015	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN SUMBER DAYADAN LAYANAN PUBLIK	BIDANG LAYANAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	05-10-2017	IV.A	15	0	DIKLAT PIM TK. IV	DES 2012	285
14	SURIANSYAH,	761011 199803 1 0	01-03-1998	III/d	01-04-2016	KEPALA SEKSI TATA KELOLA E-GOVERNMENT	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	17-12-2018	IV.a	13	1	DIKLAT PIM TK. IV	2012	285
15	MARLINA PAOB	650727 199402 2 0	01-02-1994	III/d	01-04-2018	KEPALA SEKSI STATISTIK	BIDANG PERSANDIAN DAN STATISTIK	05-10-2017	IV.A	19	2			
16	ERNI SUMIATI,	770611 199803 2 0	01-03-1998	III/d	01-04-2018	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	17-12-2018	IV.a	15	1	DIKLAT PIM TK. IV	2012	285
17	IBNU TALHAH,	321213 200604 1 0	01-04-2006	III/d	01-04-2018	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN APLIKASI	BIDANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT	12-01-2017	IV.A	12	0	DIKLAT PIM TK. IV	2015	240
18	HAVILANSYAH	650502 198903 1 0	01-03-1989	III/c	01-10-2014	KEPALA SEKSI OPERASIONAL PENGAMANAN PERSANDIAN	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	17-12-2018	IV.a	20	7	DIKLAT PIM TK. IV	2012	285

19	ARDIANSYAH,	760213 200701 1 0	01-01-2007	III/c	01-04-2015	KEPALA SEKSI KEHUMASAN DAN LAYANAN INFORMASI	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	17-12-2018	IV.a	12	5	DIKLAT PIM TK. IV	2018	893
20	EDO SANTRAD	19840719 200803 1 002	01-03-2008	III/c	10-04-2016	KEPALA SEKSI INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI	BIDANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT	05-10-2017	IV.A	9	9			
21	M. HATTA SE,	790211 200604 1 0	01-04-2006	III/c	01-04-2018	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM	SEKRETARIAT	05-10-2017	IV.A	11	2			
22	HERY MUSIDA	710204 199603 1 0	01-03-1996	III/b	01-10-2014	PENYUSUNAN BAHAN SIARAN DAN PEMBERITAAN	BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			14	1			
23	SUSILOWATI,	740312 200701 2 0	01-01-2007	III/a	01-10-2014	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN	SUBBAG KEUANGAN DAN ASET SEKRETARIAT			11	0	DIKLAT PRAJAB I	NOP 2010	174
24	MARGIONO, SE	801108 200701 1 0	01-01-2007	III/a	01-10-2014	NALIS PERSANDIA	BIDANG PERSANDIAN DAN STATISTIK SEKSI TATA KELOLA PERSANDIAN			11	0	DIKLAT PRAJAB I	AGUSTUS 2008	174
25	RAMLIANSYAH	790505 200901 1 0	01-01-2009	III/a	01-10-2014	PENGELOLA FOTO DAN VIDEO/EDITOR	BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			5	6	DIKLAT PRAJAB I	OKT 2010	174

26	SYARIFUDDIN	770621 200801 1 0	01-01-2008	III/a	01-04-2016	NATA JARINGAN I	BIDANG PENYELENGGA RAAN E- GOVERNMENT SEKSI INFRASTRUKTU R DAN TEKNOLOGI	11	3	DIKLAT PRAJAB II		
27	FARIZ DANIANSYAH SAPUTRO, S.STP	940223 201609 1 0	01-01-2016	III/a	01-10-2017	PENGELOLA DATA PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN	SUBBAG PENYUSUNAN PROGRAM SEKRETARIAT		4			
28	RAMLAH, SE	840610 201001 2 0	01-01-2010	III/a	01-04-2018	MAHARA PENGELU	SUBBAG KEUANGAN DAN ASET SEKRETARIAT	8	7	DIKLAT PRAJAB II	APRIL 2010	174
29	AGUS PADLI, S	780808 200502 1 0	01-02-2005	III/a	01-04-2018	PENGADMINIST RASIAN DATA DAN PENGELOLA KEUANGAN	BIDANG PERSANDIAN DAN STATISTIK SEKSI OPERASIONAL PENGAMANAN PERSANDIAN	2	6			
30	EDWIN HELDY	731023 199803 1 0	01-03-1998	II/d	01-04-2010	INDIKATOR KEUAN	SUBBAG KEUANGAN DAN ASET SEKRETARIAT	19	9	DIKLAT PRAJAB II	JUNI 1998	
31	ABDUL WAHAB	680327 200701 1 0	01-01-2007	II/c	01-04-2015	OPERATOR TELEKOMUNIKA SI	BIDANG PERSANDIAN DAN STATISTIK SEKSI STATISTIK	11	0	DIKLAT PRAJAB II	AGS 2008	174

32	ERNA NINGSIH	801211 200701 2 0	01-01-2007	II/c	01-04-2015	PENGOLAH DATA	BIDANG LAYANAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SEKSI PENGELOLAAN SUMBER DAYADAN LAYANAN PUBLIK			11	0	DIKLAT PRAJAB II	NOP 2008	174
33	LECHI FANITA	770328 200801 2 0	01-01-2008	II/c	01-04-2016	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	SUBBAG KEUANGAN DAN ASET SEKRETARIAT			10	0	DIKLAT PRAJAB II	JULI 2009	174
34	M. ZAKIRULLAH	730830 200901 1 0	01-01-2009	II/c	01-04-2017	PENGELOLA SISTEM DAN JARINGAN	BIDANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT SEKSI PENGEMBANGAN APLIKASI			9	0			
35	SYAPRIADY	811201 200901 1 0	01-01-2009	II/c	01-04-2017	PENGELOLA DOKUMENTASI	BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			12	11			
36	WIRAWAN	841116 200901 1 0	01-01-2009	II/c	01-04-2017	TEKNISI PENYIARAN	BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			13	0			
37	ISHAK	821019 200901 1 0	01-01-2009	II/c	01-10-2017	PENYUSUNAN KEBUTUHAN BARANG INVENTARIS	SUBBAG KEUANGAN DAN ASET SEKRETARIAT			13	4	DIKLAT PRAJAB II	NOP 2010	

38	NURYONO	820114 201001 1 0	01-01-2010	II/c	01-04-2018	TEKNISI ALAT ELEKTRO DAN ALAT KOMUNIKASI	BIDANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT SEKSI KEAMANAN INFORMASI DAN TELEKOMUNIKASI		14	0				
39	RIRIN WULANDI	850404 201001 2 0	01-01-2010	II/c	01-04-2018	PENGELOLA DATA INFORMASI, PUBLIKASI DAN PENYULUH	BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK SEKSI KEMITRAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		13	10	DIKLAT PRAJAB II	APRIL 2010	174	
40	KEMANTO	661217 200701 1 0	01-01-2007	II/b	01-04-2016	ADMINISTRASI U	SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT		11	0	DIKLAT PRAJAB II	NOP 2008	178	
41	ERY SUPARJATI	780531 201212 1 0	01-12-2012	II/b	01-04-2018	PENGELOLA DOKUMEN	BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		14	7				
42	HAMID DAVID	810612 200901 1 0	01-01-2009	II/a	01-04-2018	PENGELOLA DOKUMEN	BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		11	7	DIKLAT PRAJAB II	NOP 2010	174	

BAB II

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

2.1 Program, Kegiatan dan Anggaran Berdasarkan DPPA OPD Tahun 2019

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) merupakan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada masyarakat.

Adapaun program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika termasuk dalam urusan wajib bukan pelayanan dasar. Program dan kegiatan untuk tahun 2019 dapat digambarkan pada tabel halaman berikut :

Pemerintah Kabupaten Berau			
Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun anggaran 2019			
Kode Prog / Keg	Program	Kegiatan	Anggaran
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		937,553,000
1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,000,000
2		Penyediaan Jasa Komunikasi , sumber daya air dan listrik	96,320,000
6		Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan dinas/operasional	106,950,000
7		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	154,377,000
8		Penyediaan jasa Kebersihan Kator	37,394,000
9		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	10,000,000
10		Penyediaan ATK	15,000,000
11		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13,500,000
12		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penrangan Bangunan Kantor	5,000,000
13		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45,100,000
14		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7,100,000
15		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5,040,000
17		Penyediaan Makanan dan Minuman	34,000,000
18		Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	240,000,000
19		Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah	70,000,000
20		Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	95,772,000
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		31,500,000
2		Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya	31,500,000
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja SKPD		110,123,000
6		Sosialisasi Kinerja Program OPD	20,000,000
9		Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	81,888,000
12		Monitoring dan Evaluasi	8,235,000
15	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah		185,326,000
2		Peningkatan dan Pembinaan Bidang Persandian	185,326,000
15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi		2,220,698,181
2		Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	805,771,000
5		Pengkajian dan Pengembangan sistem Informasi	413,215,000
12		Forum Komunikasi dan Monitoring Isu Publik	100,055,000
13		Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik (PPID)	405,911,000
15		Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Komunikasi dan KIM Kabupaten Berau	48,750,000
17		Pengelolaan Media Sosial	446,996,181

18		Program Kerjasama Informasi dengan Mas		531,985,000
	2	Media	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	531,985,000
20		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi		1,016,235,819
	1	Informasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jaringan Telematika	278,999,000
	2		Peningkatan Infrastruktur Jaringan Telematika	737,236,819
21		Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik		238,679,000
	1	Daerah	Penyusunan dan Pengumpulan Data Dan Statistik Daerah	238,679,000

2.2 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Berdasarkan DPPA OPD Tahun 2019

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD adalah implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja merupakan bentuk Akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting dalam pelaporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi sehingga dapat mengetahui apakah suatu tujuan, sasaran, program dan kegiatan itu berhasil atau tidak. Dalam hal ini setiap tahun dilakukan evaluasi oleh inspektorat, adapun dari anggaran di dinas kominfo Tahun 2019 sebesar Rp. 10.598.632.500,- dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp. 5.326.532.500,- dan belanja langsung sebesar Rp. 5.272.100.000,- dengan realisasi Rp. 4.798.887.551 dengan hasil capaian kinerja hasil evaluasi oleh inspektorat mendapatkan predikat atau nilai sebesar 78 % (BB) (yg dimasukkan hasil evaluasi 2018 dan untuk 2019 diberi keterangan belum dilaksanakan evaluasi oleh inspektorat sehingga belum ada nilai).

➤ Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Pada program ini terdapat Enam (6) kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi.

Pada kegiatan ini terdapat anggaran sebesar Rp. 413.215.000,- dengan dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 396.219.846 jika digambarkan dalam persentase adalah sebesar 95,89 %.

2. Kegiatan Pembinaan dan pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi.

Pada kegiatan ini terdapat anggaran sebesar *Rp. 805.771.000,-* dengan capaian realisasi keuangan sebesar *Rp. 656.981.995* dengan tingkat capaian sebesar 81,53 %.

3. Kegiatan Forum Komunikasi dan Monitoring Isu Publik

Pada kegiatan ini tersedia anggaran sebesar *Rp. 100.055.000,-* dengan capaian realisasi keuangan sebesar *Rp. 90.358.068* dengan tingkat pencapaian sebesar 90,31 %.

4. Kegiatan Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik (PPID)

Pada kegiatan ini tersedia anggaran sebesar *Rp. 405.911.000,-* dengan capaian realisasi keuangan sebesar *Rp. 382.965.884* dengan tingkat pencapaian sebesar 94,35 %.

5. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Komunikasi dan KIM Kabupaten Berau.

Pada kegiatan ini tersedia anggaran sebesar *Rp. 48.750.000,-* dengan capaian realisasi keuangan sebesar *Rp. 47.757.000* dengan tingkat pencapaian sebesar 97,96 %.

6. Kegiatan Pengelola Media Sosial

Pada kegiatan ini tersedia anggaran sebesar *Rp. 446.966.181,-* dengan capaian realisasi keuangan sebesar *Rp. 434.210.340* dengan tingkat pencapaian sebesar 97,14%.

➤ Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media

Pada program ini terdapat Dua (2) kegiatan yaitu

1. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pada kegiatan ini tersedia anggaran sebesar *Rp. 531.985.000,-* dengan capaian realisasi keuangan sebesar *Rp. 503.317.251* dengan tingkat pencapaian sebesar 94,61%.

➤ Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Dalam program ini terdapat Dua (2) kegiatan yaitu:

1. kegiatan Peningkatan Infrastruktur Jaringan Telematika

Pada kegiatan ini tersedia anggaran sebesar Rp. 737.236.819,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 687.511.393 dengan tingkat pencapaian sebesar 93,26%.

2. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jaringan Telematika
Pada kegiatan ini tersedia anggaran sebesar Rp. 278.999.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 193.494.900 dengan tingkat pencapaian sebesar 69,35%.
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
1. Kegiatan Sosialisasi Kinerja Program OPD
Pada kegiatan ini tersedia anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 18.219.600 dengan tingkat pencapaian sebesar 91,10%.
 2. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan laporan Capaian Kinerja SKPD
Pada kegiatan ini tersedia anggaran sebesar Rp. 81.888.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 79.903.367 dengan tingkat pencapaian sebesar 97,58%.
 3. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi
Pada kegiatan ini tersedia anggaran sebesar Rp. 8.235.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 7.850.000 dengan tingkat pencapaian sebesar 95,32%.
- Program Pengembangan data/Informasi/Statistik Daerah
Pada kegiatan ini tersedia anggaran sebesar Rp. 238.679.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 217.296.354 dengan tingkat pencapaian sebesar 91,04%.
- Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah

Pada kegiatan ini tersedia anggaran sebesar Rp. 185.326.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 168.246.546 dengan tingkat pencapaian sebesar 90,78%.

2.3 Program Prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika dan Realisasi Tahun 2019 Berdasarkan RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016 – 2021

No	Program Prioritas (RPJMD)	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Kinerja		OPD	Realisasi
			2017	2021		2019
1	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Prosentase Kampung yang sudah terkoneksi Jaringan Internet	60	97	Diskominfo	80

2.4 Realisasi Pelaksanaan Program Prioritas OPD Tahun 2019 Berdasarkan RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021

Pada tahun 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau mengusung satu Program Prioritas yang tergambar dalam RPJMD Kabupaten Berau yaitu **Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Media Massa**. Untuk program tersebut di atas indikator Kinerjanya adalah Prosentase Kampung yang sudah terkoneksi internet, berdasarkan data yang kami himpun dari 13 Kecamatan ada 114 desa/kelurahan/ Kampung, yang blank spot ada 10 kampung dan 25 Sinyal Lemah sebagai berikut :

No	Kecamatan	Nama Kampung	4G	3G	2G	Blank Spot	Sinyal Lemah	Internet Desa	Provider
1	Kecamatan Segah	1. Punan Mahakam			2G			✓	Ubique, Bakti
		2. Long Ayan					Signal Lemah	✓	Ubique
		3. Harapan Jaya		3G				✓	

		4. Punan seghah				Blank Spot		✓	
		5. Long Ayap					Signal Lemah	✓	Ubique
		6. Long Laai					Signal Lemah	✓	Ubique, Bakti
		7. Pandan Sari			2G			✓	Indihome
		8. Siduung Indah					Signal Lemah	✓	Ubique, APBD
		9. Batu Rajang					Signal Lemah	✓	Indihome
		10. Bukit Makmur					Signal Lemah	✓	Indihome
		11. Gunung Sari	4G	3G	2G			✓	
		12. Tepian Buah	4G	3G	2G			✓	
		13. Punan Malinau					Signal Lemah	✓	
2	Kecamatan Tabalar	1. Semurut					Signal Lemah		
		2. Buyung-Buyung/Radak					Signal Lemah	✓	
		3. Harapan Maju			2G			✓	
		4. Tabalar Muara	4G	3G	2G				
		5. Tabalar Ulu					Signal Lemah		
		6. Tubaan		3G	2G				
3	Kecamatan Biduk-Biduk	1. Teluk Sumbang					Signal Lemah	✓	
		2. Tanjung Perepat	4G		2G				
		3. Giring -Giring	4G		2G				

		4. Pantai Harapan		3G	2G			✓	
		5. Biduk - Biduk	4G	3G	2G			✓	
		6. Teluk Sulaiman					Signal Lemah		
4	Kecamatan Talisayan	1. Eka Sapta		3G					
		2. Sumber Mulya					Signal Lemah		
		3. Suka Murya			2G				
		4. Dumaring	4G	3G	2G				
		5. Talisayan	4G	3G	2G				
		6. Tunggal Bumi			2G				
		7. Bumi Jaya			2G				
		8. Purna Sari Jaya					Signal Lemah		
		9. Capuak			2G				
		10. Campur Sari			2G				
5	Kecamatan Pulau derawan	1. Pegat Batumbuk					Signal Lemah		
		2. Teluk Semanting		3G	2G			✓	
		3. Kasai		3G	2G			✓	
		4. Tanjung Batu	4G	3G	2G			✓	
		5. Derawan	4G	3G	2G			✓	
6	Kecamatan	1. Panaan				Blank Spot		✓	

	Kelay								
		2. Merabu				Blank Spot		✓	
		3. Merapun					Signal Lemah	✓	
		4. Long Keluh				Blank Spot		✓	
		5. Long Suluy				Blank Spot		✓	
		6. Long Duhung					Signal Lemah	✓	
		7. Long Lamcin				Blank Spot		✓	
		8. Lesan Dayak				Blank Spot		✓	
		9. Long Pelay				Blank Spot		✓	
		10. Mapulu				Blank Spot		✓	
		11. Sido Bangen					Signal Lemah	✓	
		12. Long Beliu				Blank Spot		✓	
		13. Muara Lesan					Signal Lemah	✓	
		14. Merasa			2G			✓	
7	Kec. Biatan	1. Bukit Makmur Jaya		3G	2G			✓	
		2. Biatan Ulu					Singnal Lemah	✓	
		3. Biatan Banipang			2G				
		4. Biatan Baru			2G				
		5. Manunggal Jaya			2G				
		6. Biatan Lempake	4G	3G	2G				
		7. Karang			2G				

		8. Biatan Ilir					Signal Lemah		
8	Kec. Sambaliung	1. Long Lanuk			2G			✓	
		2. Tumbit Dayak			2G			✓	
		3. Inaran			2G			✓	
		4. Pesayan		3G	2G			✓	
		5. Pijanjaw			2G			✓	
		6. Bena Baru			2G			✓	
		7. Pegat Bukur	4G	3G	2G			✓	
		8. Rantau Panjang					Signal Lemah	✓	
		9. Gurimbang	4G	3G	2G			✓	
		10. Tanjung Perangkat		3G	2G			✓	
		11. Bebanir	4G	3G	2G			✓	
		12. Sukan Tengah			2G			✓	
		13. Suaran		3G	2G			✓	
		14. Sambaliung	4G	3G	2G			✓	
9	Kec. Gunung Tabur	1. Melati Jaya			2G			✓	
		2. Tasuk		3G	2G			✓	
		3. Birang		3G	2G			✓	
		4. Gunung Tabur	4G	3G	2G			✓	

		5. Maluang	4G	3G	2G			✓	
		6. Samburakat		3G	2G			✓	
		7. Sambakungan	4G	3G	2G			✓	
		8. Merancang Ulu		3G	2G			✓	
		9. Merancang Ilir		3G	2G			✓	
		10. Pulau Besing		3G	2G			✓	
		11. Batu – Batu		3G	2G			✓	
10	Kec. Maratua	1. Payung-Payung		3G			Signal Lemah	✓	
		2. Teluk Harapan	4G	3G	2G			✓	
		3. Teluk Alulu			2G			✓	
		4. Bohesilian					Signal Lemah	✓	
11	Kec. Batu Putih	1. Ampen Medang			2G			✓	
		2. Kayu Indah			2G			✓	
		3. Batu Putih	4G	3G	2G			✓	
		4. Sumber Agung	4G		2G			✓	
		5. Tembudan	4G	3G	2G			✓	
		6. Lobang Klatak			2G			✓	
		7. Balikukup					Signal Lemah	✓	
12	Kec. Tanjung Redeb		4G	3G	2G			✓	

13	Kec. Teluk Bayur		4G	3G	2G			✓	
----	------------------	--	----	----	----	--	--	---	--

Jadi jika di persentasekan dari keseluruhan jumlah kampung yang ada kampung yang masih blank spot adalah = $10/114 \times 100\% = 8,77\%$ dan yang Masih Sinyal Lemah adalah = $25/114 \times 100\% = 21,93\%$

Dalam program prioritas ini untuk tahun 2019 tersedia anggaran sebesar Rp. 2.220.698.181 (Dua Miliar Dua Ratus Dua Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Seratus Delapan Puluh Satu Rupiah), ada pun untuk realisasi anggaran untuk program diatas terserap sebesar Rp. 2.008.493.133, jika di ukur dengan nilai persentase adalah sebesar 90,44 %. Hal ini tergambar pada laporan pengawasan anggaran definitif per kegiatan pertanggal 31 Desember 2019. Didalam program ini terdapat Enam kegiatan :

1. *Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi*
2. *Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi*
3. *Kegiatan Forum Komunikasi dan Monitoring Isu Publik*
4. *Kegiatan Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik (PPID)*
5. *Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Komunikasi dan KIM Kabupaten Berau*
6. *Pengelolaan Media Sosial*

Untuk tahun 2019 anggaran yang tersedia dalam program prioritas di akui belum memenuhi sasaran hal ini dikarenakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau masih fokus terhadap pemenuhan akan kebutuhan penyediaan dan pengelolaan internet yang masih terfokus di sekitaran ibukota Kabupaten Tanjung Redeb dan pemenuhan terhadap kebutuhan OPD yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Berau. Hal lain juga yang mempengaruhi terhadap target Program prioritas tersebut adalah masih sangat tergantungnya jaringan kita terhadap pihak lain dalam hal ini adalah PT. Telkom Indonesia dan Penyedia Provider jaringan telekomunikasi seperti PT. Telkomsel, PT. Indosat dan PT. XL.Tbk.

2.5 Permasalahan dan Solusi

a. Program dan Kegiatan berdasarkan DPPA OPD Tahun 2019

➤ Permasalahan

Sejak keluarnya Undang-undang 23 tahun 2014 kewenangan Pemerintah Daerah hanya ada dua yaitu: Pengelolaan informasi dan Komunikasi publik pemerintah daerah Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan pemerintah pusat dan subdomain lingkup pemerintah daerah.

Berkaitan dengan Program Prioritas RPJMD Kabupaten Berau untuk urusan komunikasi dan informasi terdapat (Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa) indikator kinerjanya adalah Persentase Kampung yang sudah terkoneksi jaringan internet dengan target kinerja untuk tahun 2019 adalah 80 Kampung, merujuk pada Undang-undang 23 Tahun 2014 tersebut maka otomatis kewenangan pemerintah daerah dalam hal infrastruktur komunikasi dan informasi sampai kekampung-kampung bukan kewenangan pemerintah daerah lagi. Hal ini menjadi hambatan dalam mengentaskan program prioritas kepala daerah yang tergambar dalam RPJMD.

Demikian juga dengan letak geografis Kabupaten Berau yang sangat luas terdiri dari 13 kecamatan, 100 Kampung dan 10 Kelurahan sehingga jangkauan internet yang sampai kekampung-kampung belum maksimal sehingga banyak terdapat daerah-daerah yang blankspot. Demikian juga dengan anggaran yang masih sangat minim dalam menunjang Program dan Kegiatan yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pada program Peningkatan sarana dan Prasarana terdapat kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Jaringan, permasalahan yang dihadapi dari kegiatan ini adalah jarak tempuh objek yang cukup jauh dari ibukota kabupaten yang terkait dengan pemeliharaan peralatan dan jaringan yang berada dikampung merasa kecamatan Kelay. Dalam kegiatan ini Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mendukung kelancaran operasional tower di kampung Marasa harus menyiapkan bahan bakar minyak (BBM) untuk genset yang menunjang beroperasinya setiap hari. Mobiltas bahan Bakar Minyak inilah yang di anggap agak sulit karena jumlah liter bahan

bakar minyak yang di pesan dari stasiun pengisian bahan bakar harus memenuhi jumlah tertentu baru bisa di antarkan.

➤ **Solusi**

Beberapa solusi yang coba di tempuh untuk memenuhi permasalahan yang timbul dari kegiatan tersebut adalah dengan menghimbau agar kiranya pihak swasta yang beroperasi disekitar kampung merasa agar kiranya dapat ambil andil dalam memenuhi permasalahan yang dihadapi.

b. Program Prioritas berdasarkan RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021

➤ **Permasalahan**

Program Prioritas yang berdasarkan RPJMD kabupaten Berau yang berkaitan dengan Komunikasi dan Informasi adalah Program Pengembangan Komunikasi, informasi dan Media Massa. Permasalahan yang timbul dari program ini adalah masih terdapatnya beberapa jumlah kampung yang belum terkoneksi jaringan telekomunikasi. Sementara saat ini system pelaporan keuangan dana Desa sudah menerapkan pelaporan menggunakan system yang harus didukung media telekomunikasi berupa jaringan internet.

➤ **Solusi**

Untuk solusinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau telah berusaha membuatkan usulan baik itu ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ataupun Pemerintah Pusat untuk dapat kiranya di beberapa daerah yang blank spot dapat di tambah pembangunan Tower.

BAB III

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Berau untuk tahun 2019 belum ada melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat baik itu dari kementerian maupun dari lembaga lainnya sehingga tidak tergambar dalam program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau.

BAB IV

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

6.1 Kerjasama Antar Daerah

MoU Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

Untuk tahun 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau belum ada melaksanakan kerjasama yang dimaksud tersebut

6.2 Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (MoU Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau dengan pihak Ketiga) yang berlaku sampai dengan Tahun 2019:

Perjanjian Kerjasama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau dengan PT. Telkom Cabang Berau.

A. PT. Telkom Indonesia Cabang Tanjung Redeb

1. Mitra yang diajak kerjasama

PT. Telkom Indonesia

2. Dasar Hukum

Nomor MOU 197/09/MoU/BKPW/2018

Nomor TEL.480/HK.840/R6-W6C100000/2018

6.3 Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah pada Tahun 2019

Dinas Komunikasi dan Informatika untuk tahun 2019 belum ada melakukan Koordinasi dengan Instansi Vertikal, hal ini berkaitan karna Dikominfo Kabupaten Berau baru terbentuk apada tahun 2017.

BAB V

PENGHARGAAN

Penghargaan tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional serta Lembaga Lain.

Pada tahun 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika tidak menerima penghargaan dari tingkat Provinsi, Nasional maupun Internasional.

BAB VI

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Setelah dijelaskan beberapa hal dari beberapa BAB diatas maka dapat disimpulkan hal sebagai berikut:

1. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) merupakan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada masyarakat.
2. Untuk data DPA 2019 Sudah dapat di sajikan karena program dan kegiatan di tahun 2016 masih terbagi di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan Bagian Teknologi Informasi yang melekat pada Sekretariat Daerah Kab. Berau.
3. Pada BAB III terdapat urusan tugas pembantuan, hal ini juga belum terlaksana karena pada tahun 2018/2019 belum ada urusan tugas pembantuan yang di amanatkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau.

5.2. Saran

Sehubungan dengan Laporan Pertanggungjawaban Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau Tahun 2019 ada beberapa saran yang dapat kami himpun sesuai dengan kondisi OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau sebagai berikut:

- a) Untuk menunjang Urusan yang di amanatkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 dan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, agar kiranya anggaran yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika dapat ditingkatkan mengingat urusan dan tugas fungsi OPD ini cukup luas yang terdiri dari tiga urusan yaitu urusan Komunikasi dan Informatika, urusan Persandian dan urusan Statistik.
- b) Mengingat LKPJ OPD adalah sumber data untuk menyusun LKPJ Kabupaten Berau agar Kiranya Tim penyusun LKPJ Kabupaten dapat

memberi ruang waktu yang cukup mengingat di awal tahun hampir seluruh laporan dikerjakan hampir bersamaan sehingga dengan waktu yang cukup kami dari OPD dapat menyiapkan data yang lebih akurat dan teliti.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) OPD ini di buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas,

Drs. SUSILA HARJAKA

Pembina Utama Muda / IVc

Nip. 19620526198803 1 006